

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mandiana, Sari. Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: UPH Kampus Surabaya, 2021.

Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: ANDI, 2019.

Suandy, Erly, Hukum Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Supramono, Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: ANDI, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Hariyasin, Seputar Perpajakan, Kepabeanan & Hukum Menuju Indonesia Emas (1945 – 2045), Jakarta: PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2020

Sari, Diana, Konsep Dasar Perpajakan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Fatimah, Euis, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, 2011.

Sumarsan, Thomas, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Indeks, 2017.

Aartsen, Johannes Pieter, *Ekonomi Pertanian*, Jakarta: Pembangunan, 1953.

Peraturan Perundang – Undangan

“Undang – Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”

“Undang – Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”

“Undang – Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”

“Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang – Undang”

“Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan”

“Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu”

“Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”

“Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut”.

“Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai”.

Internet:

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>, diakses pada 10 April 2022

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2158>, diakses pada 11 Agustus 2022

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/download/pengumuman/3239-penegasan-terkait-perubahan-tarif-ppn-sesuai-uu-no-7-tahun-2021-tentang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-hpp-s-323.html>, diakses pada 17 Agustus 2022

[https://katadata.co.id/safrezi/berita/61658d3d7db87/inilah-alasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara agraris](https://katadata.co.id/safrezi/berita/61658d3d7db87/inilah-alasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-agraris), diakses pada 19 Agustus 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220330121319-92-777883/petani-tebu-sempat-resah-soal-isu-ppn-sembako>, diakses pada 25 Agustus 2022

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316102358-4-323186/siap-siap-boncos-sembako-ini-bakal-kena-pajak-bulan-depan>, diakses pada 25 Agustus 2022

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210606/12/1401966/rencana-pemerintah-jadikan-bahan-pokok-objek-pajak-tuai-beragam-reaksi>, diakses pada 25 Agustus 2020

